

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN

Nina Andriany Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ninaandriany@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

This research aims to prepare a Budget Realization Report (LRA) which includes ratios with criteria. The theory used in this research is government accounting standards and the hypothesis proposed is that income variance is unfavorable, regional independence is very good and the effectiveness of PAD is quite effective. That the analytical tool in this research uses a quantitative descriptive method, namely by studying government accounting standards applied in the field so that there are differences with phenomena and the field in the field of the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). Based on the research results, it can be concluded that regional revenues have not been able to obtain revenues exceeding the budgeted amount and have not been able to increase original regional revenues, including revenues.

Keywords: Budget Realization Report, Income Analysis and PAD Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Pendapatan bisa ditingkatkan lagi, di antaranya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan sebagai pengelola pendapatan daerah dapat lebih mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak dan retribusi agar lebih proaktif lagi, memfasilitasi wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan lebih sederhana, seperti digitalisasi dan retribusi daerah. Realisasi pendapatan daerah mencapai 80 persen. Sebab triwulan III kinerja arus kas di tingkat maksimum, baik pendapatan dan belanja daerah.

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumatera Utara, menyatakan realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp. 3,52 triliun lebih sepanjang tahun ini. Hingga September ini realisasi pendapatan baru sekitar 55 persen atau 3,52 triliun dari target 6,4 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah, lanjut dia, baru sekitar 44,7 persen atau mencapai tiga triliun dari total 6,7 triliun yang ditetapkan dalam APBD Kota Medan 2022. Pihaknya melihat terjadi keseimbangan yang cukup sehat dalam arus kas Pemerintah Kota Medan antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan daerah harus tetap lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah agar pemerintah punya persediaan yang cukup menjaga likuiditas keuangan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penyusunan anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan agar lebih efektif.

Anggaran Sektor Publik (ASP) adalah suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. ASP merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/ belanja), dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai (pendapatan). ASP Sangat penting dalam rangka membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga ASP merupakan *blue-print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yang akan datang.

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "Belanja Rutin". Belanja Rutin adalah merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Dikatakan rutin, karena pengeluaran tersebut sifatnya berulang-ulang dan ada setiap tahun.

Anggaran modal merupakan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap (*fixed assets*), seperti gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan perabot lainnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah.

APBD yang dipresentasikan eksekutif memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk:

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

Dengan anggaran pemerintah dapat mengalikasikan sumberdaya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang lebih penting lagi dapat merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal/ investasi.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD).
- 3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a) nama entitas pelaporan dan entitas akuntansi atau sarana identifikasi lainnya; b) cakupan entitas pelaporan; c) periode yang dicakup; d) mata uang pelaporan; dan e) satuan angka yang digunakan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi

Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.3 Realisasi Anggaran Pendapatan

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan terdiri dari:

- a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
- b. Pendapatan (Basis Akruwal) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Pendapatan adalah semua penerimaan Daerah dalam bentuk peningkatan aktiva dan penurunan utang dari berbagai sumber periode tahun Anggaran bersangkutan. Seperti halnya Akuntansi perusahaan, Akuntansi Pemerintahan mempunyai pendapatan dalam melakukan kegiatan keuangannya, dan pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah (pendapatan diakui dan dicatat menggunakan basis kas). Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelapor lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada

periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan pusat dan daerah. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan adalah pengakuan pendapatan daerah didasarkan atas basis kas (cash basis) yaitu kas dicatat disebelah debit pada pendapatan disebelah kredit, dan selama tahun anggaran berjalan setiap aliran kas masuk yang malalui kas daerah dicatat pada saat penerimaan kas tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Menurut Sugiyono (2015), "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya". Menurut Sugiyono (2018), "Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya".

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder yaitu data/ dokumen yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

- a. Pengumpulan Data: merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- b. Reduksi Data: merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian Data: merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. APBD Kota Medan Tahun 2022

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	6.422,20 M	5.656,52 M	88.08
PAD	3.050,59 M	2.187,53 M	71.71
Pajak Daerah	2.587,78 M	1.961,45 M	75.80

Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(02), 2023, 5

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Retribusi Daerah	252,90 M	113,90 M	45.04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,94 M	17,68 M	73.84
Lain-Lain PAD yang Sah	185,98 M	94,50 M	50.82
TKDD *)	2.319,61 M	2.281,56 M	98.36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.319,61 M	2.281,56 M	98.36
Pendapatan Lainnya	1.051,99 M	1.187,44 M	112.87
Pendapatan Transfer Antar Daerah	974,22 M	1.122,96 M	115.27
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	77,77 M	64,47 M	82.90
Belanja Daerah	6.722,20 M	6.263,29 M	93.17
Belanja Pegawai	1.959,86 M	1.839,57 M	93.86
Belanja Pegawai	1.959,86 M	1.839,57 M	93.86
Belanja Barang Jasa	2.411,46 M	2.372,94 M	98.40
Belanja Barang dan Jasa	2.411,46 M	2.372,94 M	98.40
Belanja Modal	1.707,73 M	1.527,38 M	89.44
Belanja Modal	1.707,73 M	1.527,38 M	89.44
Belanja Lainnya	643,15 M	523,40 M	81.38
Belanja Hibah	493,09 M	436,43 M	88.51
Belanja Bantuan Sosial	74,26 M	57,07 M	76.85
Belanja Tidak Terduga	75,80 M	29,90 M	39.44
Surplus/ (Defisit)	-300,00 M	-606,77 M	202.26

Pembiayaan Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Daerah	300,00 M	1.146,60 M	382.20
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300,00 M	1.146,60 M	382.20

Sumber: Data APBD Medan (2022)

4.2 Analisis Pendapatan Daerah

1. Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

2. Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Berdasarkan hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, disajikan rekapitulasi hasil analisis sebagai berikut:

1. Varians Pendapatan = 5.656.520.000 – 6.422.200.000 = - 765.680.000

2. Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{2.187.530.000}{2.281.560.000} \times 100\% = 95,88\%$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = $\frac{2.187.530.000}{3.050.590.000} \times 100\% = 71,71\%$

Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Daerah, belum mampu melebihi dari jumlah anggaran terdapat realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan. Hal ini dikemukakan angka Varians Pendapatan ditahun 2022 sebesar – Rp. 765.680.000-, menunjukkan kriteria kurang baik.

Analisis Rasio Kemandirian Daerah, sudah mampu mencapai kemandirian daerah terlihat bahwa baiknya dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang

ditargetkan sehingga tidak ada ketergantungan dana bagi hasil dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikemukakan angka rasio Kemandirian Daerah ditahun 2022 sebesar 95,88%, menunjukkan kriteria 80 - 100% baik sekali.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum sepenuhnya mampu pencapaian tujuan secara tepat atau tepat sasaran dengan mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan

dalam merealisasikan dan pemanfaatan penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Hal ini dikemukakan angka Rasio Efektivitas PAD ditahun 2022 sebesar 71,71%, menunjukkan kriteria 70 - 80% cukup efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dikatakan kurang baik dalam merealisasikan pendapatan yang jumlahnya dibawah dari anggaran.
- b. Rasio Kemandirian Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, baik dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang ditargetkan.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan cukup Efektif pencapaian tujuan secara tepat atau tepat sasaran dalam mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Medan tahun 2022, Pendapatan Daerah sebaiknya mengupayakan pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga sumber dayanya.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti Selanjutnya lebih mendalami mengenai kinerja realisasi keuangan pada Pemerintah Daerah dan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat

juga diharapkan ruang lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal ISSN (2303-1174) Hlm. 279-282.
- Espinoza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Jandi, Ibnu. (2014). *Kajian Atau Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Daerah Pada APBD 2014 Di 34 Provinsi Dalam Wilayah NKRI*. Kompasiana.com.
- Mentari Kurnia dan Ririn Irma. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ISSN.
- Nabila Astriana, Muhibtari. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Risky, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.